

**INOVASI PENGAWASAN TERPADU DAN MUTU HASIL PERIKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

ARIE PURNAMA

Nomor Stambuk : 10564 02269 15



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**INOVASI PENGAWASAN TERPADU DAN MUTU HASIL PERIKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

ARIE PURNAMA

Nomor Stambuk : 10564 02269 15

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil
Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Nama Mahasiswa : Arie Purnama
Nomor Stambuk : 10564 02269 15
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jaelan Usman, M. Si


Drs. H. Ansvari Mone, M.Pd

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan


Universitas Muhammadiyah Makassar

Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Ikhani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Nurvanti Mustari, S.IP, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Arie Purnama
Nomor Stambuk : 10564 02269 15
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 23 September 2019

Yang Menyatakan,



Arie Purnama



ABSTRAK

Arie Purnama, 2019. Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar (Dibimbing oleh Jaelan Usman dan Ansyari Mone)

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai data yang terkumpul dari lapangan objektif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deksriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan informasi dari informan, reduksi data, dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menjaga dan meningkatkan hasil perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Meskipun hasilnya belum maksimal, namun pemerintah berupaya memperketat pengawasan di daerah laut selayar sehingga tidak terjadi lagi kasus *illegal fishing* yang membahayakan laut dan yang ada di dalamnya. Dengan adanya pelatihan yang memberikan pelatihan terkait aplikasi khusus untuk nelayan yang bisa memberikan kemudahan bagi nelayan menangkap ikan dan update informasi harga pasar setiap hari. Pelatihan dan sosialisasi yang pertama kali dilaksanakan ini sangat dibutuhkan dan perlu keberlanjutan pelatihan yang lebih detil lagi karena di era digital ini nelayan tidak boleh tertinggal dengan teknologi informasi. Sasaran dari program Nelayan Go Online ini adalah untuk memberikan fasilitas edukasi dan pembelajaran kepada para nelayan dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital sehingga nelayan dapat memasarkan dan menjual produknya pada *marketplace* yang sudah ada.

Kata Kunci : inovasi, pengawasan, mutu hasil perikanan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar” yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat kepada Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ansyari Mone M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Para pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian, Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis, Keluarga besar HIMJIP, IIM Kom. Sospol, BEM Fisipol Unismuh Makassar, Saudara(i) Sospol 015 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. dan mendukungnya terselesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua Orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang perkuliahan saat ini, mendoakan, member semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini,

kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Se,oga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan susmbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 23 September 2019

Arie Purnama



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengajuan Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan.	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Inovasi.....	9
B. Konsep Pengawasan.....	9
C. Konsep Mutu	13
D. Konsep Perikanan.....	16
E. Kerangka Pikir	19
F. Fokus Penelitian.....	21
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	24
C. Sumber Data	25
D. Informan Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisa Data.....	28
G. Pengabsahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum.....	31
B. Bentuk.....	36
a. Wilayah.....	36
b. Batasan.....	42
c. Aturan.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inovasi merupakan suatu proses dan hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk sumber daya yang telah ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Inovasi juga dapat diartikan sebagai suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih bagi manusia. Proses inovasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan karena kedua hal tersebut dapat memudahkan dalam memproduksi sesuatu yang baru dan berbeda

Berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar di antaranya 260 jenis terumbu karang, 12 jenis lamun, ekosistem mangrove, pulau-pulau kecil cantik, termasuk atoll terbesar kedua di dunia, yaitu Taka Bonerate. Dengan potensi tersebut, Kabupaten Kepulauan Selayar didorong untuk mengoptimalkan potensi perikanan, pariwisata, dan potensi maritim lainnya. Dalam hal pengelolaan potensi perikanan, selain *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, destructive fishing* (penangkapan ikan dengan cara yang merusak) di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi salah satu isu yang sudah lama menjadi perhatian KKP. Kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam itu dapat menyebabkan apa yang dimiliki Indonesia harus dikelola dengan baik dan dijadikan masa depan bangsa.

Dalam Undang-Undang No.115 Tahun 2015 tentang satuan Tugas (Satgas) Pasal 2 ayat 1 (UU No.115,2015) tentang Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) disebutkan bahwa Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara illegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya. Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) membuat aturan pembatasan kapal penangkap ikan berukuran maksimum 150 GT dan kapal penangkut 200 GT. Hal ini untuk mencegah agar ikan hasil tangkapan tidak langsung dibawa dan dijual ke luar negeri secara illegal.

Kegiatan Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil perikanan ini merupakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk secara bersama-sama mencegah tindakan *illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*. Program pengawasan terpadu dan mutu hasil perikanan berupaya untuk menjaga dan meningkatkan mutu hasil perikanan yang berkualitas, sehingga hasil perikanan dapat diekspor ke seluruh Provinsi Sulawesi Selatan serta mampu dilalulintaskan antar Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan melakukan pengawasan terpadu dan mutu hasil perikanan di Kabupaten kepulauan Selayar.

Dasar Pengawasan dan mutu hasil perikanan di Indonesia mempunyai peraturan kewenangan pengelolaan wilayah laut antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menyebabkan munculnya konflik pada nelayan antar daerah di

Indonesia. Selain itu, berdampak pada pengelolaan sumber daya ikan yang saat ini telah mengalami *overfishing* (lebih tangkap) yang menyebabkan menipisnya sumber daya ikan yang pada akhirnya terjadi penurunan kualitas dan mutu hasil perikanan dari sumber daya ikan tersebut. Kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar belum dikelola dan di manfaatkan secara optimal dikarenakan antara lain, masih rendahnya sumberdaya manusia nelayan dan pembudidaya ikan, sarana dan prasarana yang masih terbatas, teknologi penangkapan yang masih tradisional (Vol 1, No.2 2014)

Potensi Perikanan Karang di Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri memicu terjadinya penangkapan ikan yang merusak dan tidak ramah lingkungan seperti bom ikan dan sianida. Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar 2018 melaksanakan pengawasan terpadu di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sementara itu Kepulauan Selayar berhadapan langsung dengan laut lepas sehingga dengan mudah muncul penggunaan modus bus, bom ikan hingga penggunaan kompresor. Sepanjang tahun 2015, selama 6 bulan terakhir, polair Selayar berhasil mengamankan 10 kasus *illegal fishing* terdiri dari modus bus, bom ikan hingga penggunaan kompresor serta mengamankan dua kapal besar ukuran 5GT dan 10 kapal jolor balap. (Polres Selayar, 2015).

Laut adalah kehidupan, Tidak hanya bagi mereka yang tinggal di pesisir namun juga yang hidup di dataran dan pegunungan. Begitu pula dengan desa-desa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Layaknya kabupaten lain di Kawasan Timur Indonesia, sebesar 92 persen dari 22.885,35 km² wilayah

Selayar adalah laut (kompasiana,2013). Tidak mengherankan bila hampir di 52 desa pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar menggantungkan hidupnya dari sumber daya laut. Peningkatan mutu hasil perikanan tidak mengenal musim untuk dapat memanen hasil budidaya perikanan, melainkan bisa di atur sendiri oleh nelayan atau pembudidaya ikan untuk dapat menghasilkan panen yang berkualitas. Selain itu pembudidaya harus melakukan pengawasan terpadu seperti memperhatikan bibit ikan yang akan dibudidayakan nantinya. Sebelum di terapkan menjadi Program Pengawasan terpadu dan mutu hasil perikanan Daerah, masyarakat diperkenalkan pada Konsep Daerah Laut (DPL). Pada awalnya menganggap adanya DPL akan mengurangi hasil karena mempersempit wilayah tangkapan melainkan mengurangi perusakan wilayah terumbu karang.

Ketergantungan yang tinggi negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia terhadap sumber daya laut menyebabkan nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah yang banyak melalui cara melalui cara yang mudah yaitu dengan cara merusak (*desructive fishing*) dimana melanggar pada kode etik perikanan yang tidak bertanggung jawab atas akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatannya ekosistem laut, hal yang paling umum dilakukan adalah *illegal fishing*. Permasalahan yang mendasar dari kasus *illegal fishing* itu sendiri adalah terjadinya ketidakpastian dan kejelasan hukum, birokrasi dan dalam hal perizinan. Ketidakpastian hukum disini adalah adanya beberapa hal seperti pemahaman yang berbeda atas aturan yang ada. Adanya pula diskriminasi dalam pelaksanaan hukuman bagi yang melanggar, persekongkolan antara pengusaha lokal,

pengusaha asing dan pihak peradilan. Peradilan terhadap pelanggaran juga terbilang terlarut-larut.

Pemerintah tidak akan berhenti untuk menegakkan kedaulatan di laut Indonesia. Peran Pengawas Perikanan dalam pengolahan ikan sangatlah penting untuk mengawasi pelaku usaha agar menaati peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Pengawas perikanan dapat memasuki tempat usaha pembudidayaan ikan, pemeriksaan dokumen perijinan, pengawasan penggunaan obat tambahan. Untuk itu di tuntut peran aktif pengawas perikanan harus memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah Kerja Selayar mencatat, sepanjang tahun 2017 terdapat total 217.349 ton komoditi perikanan yang dilalulintaskan, dengan komoditas utama kerapu dan ikan layang. Selain terlibat dalam pengawasan, DKP Kabupaten Kepulauan Selayar bersama dengan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros mengadakan Sosialisasi Budidaya Ikan yang baik. Tujuannya untuk meningkatkan produksi udang vannamei yang banyak dibudidayakan di wilayah Selayar. Sebagaimana diketahui , sepanjang tahun 2017 produksi udang vannamei Selayar mencapai 400 ton yang didistribusikan ke pabrik-pabrik udang di Makassar. Udang vannamei merupakan komoditi peikanan terbesar di Sulawesi Selatan dengan tujuan ekspor Amerika Serikat, Vietnam, Jepang, dan Tiongkok (bkipm1,12 2018).

Inovasi pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu tangkapan ikan bagi teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan yaitu, memiliki selektivitas tinggi artinya, alat tangkap tersebut diupayakan hanya dapat menangkap ikan/organisme lain. Ada dua macam selektivitas yakni selektivitas ukuran dan selektivitas jenis. Hasil Penangkapan Sampangan (*bycatch*) Rendah Byatch merupakan tangkapan ikan on target yang tertangkap dalam proses penangkapan, karena tangkapan sampangan ini tertangkap bersamaan dengan target penangkapan. Hasil tangkapan tinggi, tidak merusak habitat/lingkungan (*destruktif*), mempertahankan keanekaragaman hayati, tidak menangkap spesies yang dilindungi, pengoperasian alat pancing ikan yang tidak membahayakan keselamatan, tidak melakukan penangkapan ikan di daerah terlarang dan dapat diterima sosial.

Kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dikarenakan antara lain, masih rendahnya sumberdaya manusia nelayan dan pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana yang masih terbatas, teknologi penangkapan yang masih tradisional, lemahnya permodalan serta adanya oknum masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya yang tidak terkendali. Penerapan wilayah, batasan dan aturan pada pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui akan membuatnya lebih produktif. Oleh karena itu, beberapa daerah sudah menerapkan kearifan lokal sendiri dengan pengaturan sasi maupun hari libur menangkap ikan untuk menjaga produktivitasnya. Pengawasan dan mutu hasil harus dilakukan sejak awal proses produksi sampai saluran distribusi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen,

meningkatkan jaminan keamanan produk, mencegah banyaknya produksi yang rusak dan mencegah pemborosan biaya akibat kerugian yang ditimbulkan.

Melihat Pengawasan terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar, penulis tertarik membuat karya tulis yang berjudul “*Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar.*” Dengan harapan semoga tulisan ini bermanfaat untuk dapat mengetahui bagaimana Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga dapat menghasilkan panen yang berkualitas dan dapat di ekspor ke seluruh Provinsi Sulawesi Selatan serta mampu dilalulintaskan antar Provinsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Inovasi Pengawasan Terpadu Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Bagaimana Mutu Hasil Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah maka Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengawasan Terpadu Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Untuk mengetahui Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan dalam meningkatkan hasil panen Perikanan demi mewujudkan Mutu Hasil yang berkualitas di Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - b. Memberikan Sumbangan pemikiran bagi disiplin Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang Inovasi Pemerintahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat digunakan bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam rangka Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan dalam meningkatkan hasil panen yang berkualitas.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan khususnya yang terkait dengan Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan dalam meningkatkan hasil panen yang berkualitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Inovasi

Sutarno (2012:132), Inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Inti lain dari inovasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah suatu produk, proses atau jasa serta mendorong individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi.

Inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal baru oleh seseorang atau kelompok untuk di adopsi (Suwarno, 2008:9).

Inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas (West dan Far, Ancok, 2012:34). Inovasi dalam konsep yang luas tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi juga dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru.

B. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila

perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencanayang telah ditetapkan (George R.Tery,2006:395).

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (Muchsan,1992:38).

Sondang.P.Siagian(2005:125) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Jadi Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Jackson (2006:303) menyatakan bahwa Pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan kepada karyawan. Definisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya.

Menurut Ernie dan Saefullah (2005:12), fungsi Pengawasan adalah:

- a) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
- b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin di temukan.
- c) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Adapun sistem Pengawasan sebagai berikut:

Sistem Komperatif yaitu :

- a) Mempelajari laporan kemajuan pekerjaan.

- b) Membandingkan laporan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana.
- c) Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan, termasuk pengaruh faktor lingkungan.
- d) Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan termasuk para penanggung jawabnya.
- e) Membuat suatu keputusan untuk perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan.

Adapun sistem Verifikasi, yaitu menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan. Kemudian membuat laporan secara periodik terhadap hasil pemeriksaan serta mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaan. Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaan dan mengambil keputusan untuk tindakan-tindakan perbaikan atau penyempurnaan.

Objek Pengawasan merupakan hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana. Objek pengawasan ini secara garis besar dikelompokkan menjadi 4, yakni:

- a) Kualitatif dan kuantitatif program, yakni barang atau jasa yang di hasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.
- b) Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program.

- c) Pelaksanaan program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- d) Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pemimpin atau manajer.

Tujuan Pengawasan aktivitas pengawasan memiliki berbagai macam tujuan dalam manajemen organisasi, diantaranya:

- a) Menjamin kebijakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- b) Melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan.
- c) Menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.
- d) Melakukan penjaminan akan terwujudnya kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

B. Konsep Mutu

Mutu adalah produk yang dinilai berkualitas jika memiliki kesesuaian terhadap spesifikasi dan memenuhi persyaratan biaya serta di kaitkan dengan desain dan harga yang ditentukan. (Purnama, 2006:14-15). Mutu sangatlah penting dalam suatu atau produk khususnya produk perikanan, Mutu suatu produk harus tetap dijaga untuk keamanan konsumen dan mempertahankan kepercayaan konsumen untuk tetap membeli produk usaha tersebut. Mutu suatu produk khususnya produk perikanan harus tetap dijaga, hal ini karena produk karena

produk yang berasal dari hasil laut atau ikan akan lebih cepat menurun kualitas mutunya yang nantinya akan berdampak pada kerusakan dan kebusukan produk.

Konsep mutu menurut Salli (2010:59), merupakan pembeli jasa atau produk dari organisasi tetapi juga pelanggan internal, yaitu orang yang berinteraksi pada layanan satu dengan layanan lain dalam organisasi organisasi. Mutu memiliki pengertian yang bervariasi, “Mutu merupakan konsep yang licin” Mutu mengimplikasikan hal-hal yang berbeda pada masing-masing orang. Mutu merupakan suatu ide yang dinamis sehingga makna mutu juga sedikit membingungkan karena begitu luas. Akan tetapi, beberapa konsekuensi praktis yang signifikan akan muncul dari perbedaan-perbedaan makna tersebut. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum. Produk atau layanan yang memiliki mutu, dalam konsep relative itu tidak harus mahal dan eksklusif.

Tujuan Mutu yaitu:

- a) Tujuan dari Mutu Hasil Perikanan adalah untuk mengetahui ketahanan suatu produk hasil perikanan tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu lama dan aman untuk di konsumsi.
- b) Tujuan pengendalian mutu adalah untuk mengetahui mutu, potensi bahaya produk, mengetahui prosedur/sistem pengendalian mutu, sampai dengan studi kasus aplikasinya pada industri perikanan dan untuk mengurangi total biaya produksi akibat kegagalan produk.

Manfaat Mutu yaitu:

- a) Penanganan mutu dan pengendalian mutu tersebut adalah untuk lebih merasa hati-hati dan lebih waspada dalam memilih suatu produk makanan.
- b) Sedangkan untuk perusahaan produk tersebut adalah manfaatnya untuk membuat konsumen percaya produk yang kita hasilkan tersebut mutunya, sehingga keuntungan dari usaha tersebut pun akan tinggi.

Mutu merupakan kualitas yang tergantung pada orang yang menggunakannya, dan produk yang saling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang paling berkualitas (Nasution,2005:6). Berdasarkan beberapa defisini yang telah dikemukakan di atas secara garis besar, Mutu adalah keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa yang dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Mutu produk atau jasa akan dapat diwujudkan bila orientasi seluruh kegiatan perusahaan berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

Menurut (Russel dan Taylor 2003:43), Mutu mengandung arti nilai-nilai tertentu yang di inginkan pada suatu material, produk atau jasa. Seperti pada hasil pertanian pada umumnya, hasil perikanan pun mengandung paling kurang beberapa aspek mutu, antara lain:

- a) Aspek Bio-Tekno-Ekonomis (pertanian/perikanan). Hasil perikanan secara biologis mengandung nilai gizi yang secara teknologis dan ekonomis dengan menerapkan kaidah ekonomi.
- b) Aspek Sanitasi dan higienis (kesehatan). Mutu gizi dan higienis yang memenuhi persyaratan kesehatan, yang tidak membahayakan kesehatan.
- c) Aspek Komersial. Nilai komersial produk perikanan yang dapat dipindahkan kepada pihak lalu melalui penggolongan mutu (*grade grading*).
- d) Aspek Industrial. Nilai mutu pada produk yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan industrial. Misalkan pemanfaatan sesuatu jenis minyak ikan untuk tujuan industri kosmetik.
- e) Aspek Hukum (legal). Nilai mutu yang terkandung pada sesuatu produk perikanan ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan.

C. Konsep Perikanan

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Perikanan diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yakni biota perairan, habitat biota, dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut (Lackey, 2005). Setiap komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan. Kemudian membagi perikanan ke dalam berbagai kelompok atau tipe berdasarkan beberapa sifat antara lain:

- a) Jenis lingkungan: contoh, perikanan air tawar, danau, laut, sungai, bendungan
- b) Metode penangkapan ikan: contoh, penangkapan ikan dengan *trawl*, *purse seine*, *dipnet*, *Gillnet*, *Cashnet*, ataupun Pancing.
- c) Jenis akses yang diizinkan misalnya, perikanan dengan akses terbuka (*open access*), perikanan *open access* dengan regulasi, perikanan dengan akses terbatas. Dan Indonesia termasuk dalam kategori perikanan *Open Access* dengan regulasi. Karena ada pelarangan dimana asing tidak boleh menangkap ikan atau ikut dalam kegiatan perikanan tangkap.
- d) *Concern Organisme*, contoh, perikanan komersial, sub-sistem, perikanan rekreasi, ataupun perikanan penelitian.
- e) Derajat kealamanan dari hewan target, total dari alam, semi budi daya, atau total budi daya. Dalam konteks bahasan perikanan sehari-hari baik tatanan praktis maupun ilmiah.

Pengertian Perikanan tidak hanya aktivitas tentang menangkap ikan, tetapi pengertian perikanan bisa dilihat dari beberapa aspek seperti pengertian perikanan tangkap, pengertian perikanan budidaya dan pengetahuan perikanan daerah serta pengertian perikanan yang lainnya.

Perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut, ini membatasi pada perikanan laut, karena perikanan memang semua berasal dari kegiatan *hunting* (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan *farming* seperti budidaya (Hempel & Pauly).

Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (UU Nomor 45 Tahun 2009). Program peningkatan produksi perikanan dilakukan secara menyeluruh, baik peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia pelaku usaha dan pelaku utama (nelayan, pembudidaya, pengolah ikan) baik secara teknis ataupun manajerial, maupun upaya peningkatan kompetensi petugas perikanan, diantaranya tenaga pendidik, tenaga penyuluh perikanan dan pengawas perikanan. Untuk peningkatan kompetensi pengawas perikanan, khususnya pengawas perikanan tangkap, telah dilakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan pengawasan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan cenderung makin berkurang, interaksi antara masyarakat lebih banyak terepresi dalam bentuk saling kompetensi dalam memanfaatkan sumberdaya ikan adalah alasan terjadinya kegagalan pengelolaan perikanan yang ditunjukkan dengan rusaknya jual ke konsumen akhir tinggi (Vol.10 No.2,12 2009). Sumberdaya perikanan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Dengan demikian, agar kelestarian sumberdaya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti disertai dengan penegakan hukum. Dengan kata lain, lemahnya penegakan hukum inilah yang menjadi penyebab rusaknya ekosistem perairan laut.

Pengelolaan perikanan merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah. Pengelolaan perikanan merupakan upaya yang sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya kompleksitas permasalahan, baik ekologi maupun sosial-ekonomi di wilayah pesisir dan laut yang *open access*. Praktek *open access* yang selama ini banyak menimbulkan masalah yaitu kerusakan sumber daya laut, pencemaran, *over-exploitation*, dan konflik-konflik antar nelayan. Sebagaimana sebuah aset penting, potensi sumberdaya ikan yang ada perlu untuk selalu dijaga keberadaannya. Dalam pengelolaan sumberdaya alam, kegiatan penangkapan ikan harus memiliki beberapa pengaturan dan pembatasan agar tidak menghancurkan sumberdaya yang ada. Penggunaan bom dalam penangkapan ikan adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga illegal di seluruh Indonesia. Bom dikemas menggunakan bubuk dalam wadah tertentu dan dipasang sumbu untuk kemudian dinyalakan dan dilemparkan ke dalam air. Bom akan meledak dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan yang dapat membunuh hamper semua biota laut yang ada di sekitarnya. Nelayan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melihat gambaran mengenai pengawasan dan mutu. Inovasi merupakan suatu proses pembaruan dari berbagai sumber daya, sehingga sumber daya tersebut bisa memiliki manfaat yang lebih bagi manusia. Sumber daya tersebut bisa mengenai alam, energi, ekonomi,

tenaga kerja, penggunaan teknologi, Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencanayang telah ditetapkan (George R.Tery,2006:395).

Sedangkan Mutu merupakan kualitas yang tergantung pada orang yang menggunakannya, dan produk yang saling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang paling berkualitas (Nasution,2005:6). Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum, produk atau layanan yang memiliki mutu dalam konsep relative itu tidak harus mahal dan eksklusif. Kerangka pikir yang ada dapat digambarkan sebagai berikut





E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada “Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Proses terjadinya inovasi dilihat dari bagaimana langkah proses terjadinya Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.

Fungsi Pengawasan berarti mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang diterapkan. Dengan mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Tujuan Pengawasan berarti menjamin pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dengan melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan demi menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran. Serta melakukan penjaminan akan terwujudnya kepuasan konsumen terhadap produk konsumen terhadap produk yang dihasilkan (apabila perusahaan nirlaba), dan membangun kepercayaan konsumen/publik pada kepemimpinan organisasi/perusahaan/pemerintahan.

Mutu adalah produk yang dinilai berkualitas jika memiliki kesesuaian terhadap spesifikasi dan memenuhi persyaratan biaya serta dikaitkan dengan desain dan harga yang ditentukan. Mutu sangatlah penting dalam suatu atau

produk khususnya produk perikanan, mutu suatu produk harus tetap dijaga untuk keamanan konsumen dan mempertahankan kepercayaan konsumen untuk tetap membeli produk usaha tersebut. Mutu suatu produk khususnya produk perikanan harus tetap dijaga, hal ini karena produk karena yang berasal dari hasil laut atau ikan akan lebih cepat menurun kualitas mutunya yang nantinya akan berdampak pada kerusakan dan kebusukan produk.

Tujuan Mutu yaitu:

- a) Tujuan dari Mutu Hasil Perikanan adalah untuk mengetahui ketahanan suatu produk hasil perikanan tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu lama dan aman untuk dikonsumsi.
- b) Tujuan Pengendalian Mutu adalah untuk mengetahui mutu, potensi bahaya produk, mengetahui prosedur/system pengendalian mutu, sampai dengan studi kasus aplikasinya pada industri perikanan dan untuk mengurangi total biaya produksi akibat kegagalan produk.

Manfaat Mutu yaitu:

- a) Penanganan mutu dan pengendalian mutu tersebut adalah untuk lebih merasa hati-hati dan lebih waspada dalam memilih suatu produk makanan.
- b) Sedangkan untuk perusahaan produk tersebut adalah manfaatnya untuk membuat konsumen percaya produk yang kita hasilkan

tersebut mutunya, sehingga keuntungan dari usaha tersebut pun akan tinggi.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas secara garis besar, Mutu adalah keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa yang dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Mutu produk atau jasa akan dapat diwujudkan bila orientasi seluruh kegiatan perusahaan berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Mutu perikanan merupakan syarat wajib bagi produk perikanan agar bisa dikatakan produk perikanan tersebut layak untuk dikonsumsi, selain itu mutu perikanan merupakan sebuah langkah untuk meningkatkan komoditas perikanan di bidang ekspor. Dalam jaminan mutu perikanan tidak hanya mencakup kelayakan dari hasil perikanan tersebut namun juga nilai gizi dan kondisi yang harus dilakukan dengan berbagai penelitian perikanan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu 2 bulan setelah Seminar Proposal. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), yang dilakukan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan pertimbangan dan alasan yakni untuk mengetahui Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang Sumber Data.

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (Pasolong,2013:161) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisas

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan peristiwa yang sebenarnya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek peneliti.

Oleh karena itu peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti tentang Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan.

C. Sumber Data

Menurut Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J.Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif dalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan. Terkait upaya Dinas Kelautan dan Perikanan mengatasi

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian ini. *Purposive sampling* adalah penentuan informan tidak berdasarkan atas strata, kedudukan pedoman atau wilayah tetapi berdasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Dalam penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pengetahuan tentang masalah penelitian yang akan diteliti guna memperoleh data dan informasi yang akurat. Sesuai dengan kebutuhan peneliti terkait dengan penerapan Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 1 Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Ir. Makkawaru	MK	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar
2.	Syaiful Asri K, S.Pi	SA	Kepala Pengawasan Satwas Takalar

			Wilker Pos PSDKP Selayar (Dinas Kelautan & Perikanan)
3.	Ardiyansah	A	Nelayan
4	Rizal	R	Nelayan

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena itu seorang peneliti harus terampil dalam pengumpulan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang akurat mengenai relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
2. Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya, Wawancara dilakukan peneliti dengan aparat desa sebagai lokasi penelitian tentang Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan.

3. Dokumentasi, adalah suatu pengumpulan data melalui dokumentasi dalam bentuk gambar. Dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (Observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan. Hasil pengumpulan data tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk *content* analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian (Maleong,2001).

G. Pengabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pengumpulan data Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang

telah ada. Pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut (Sugyono) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Adapun macam jenis triangulasi yaitu:

a). Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

c) Triangulasi Teknik

Dalam teknik ini, menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis. Pada triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain.

d) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini berupa deskripsi mengenai kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian kualitatif peneliti dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data. Pada penelitian kualitatif peneliti bukan sebagaimana seharusnya apa yang dipikirkan oleh peneliti tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh sumber data. Dengan melakukan penelitian melalui pendekatan deskriptif maka peneliti harus memaparkan, menjelaskan, menggambarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan para informan.

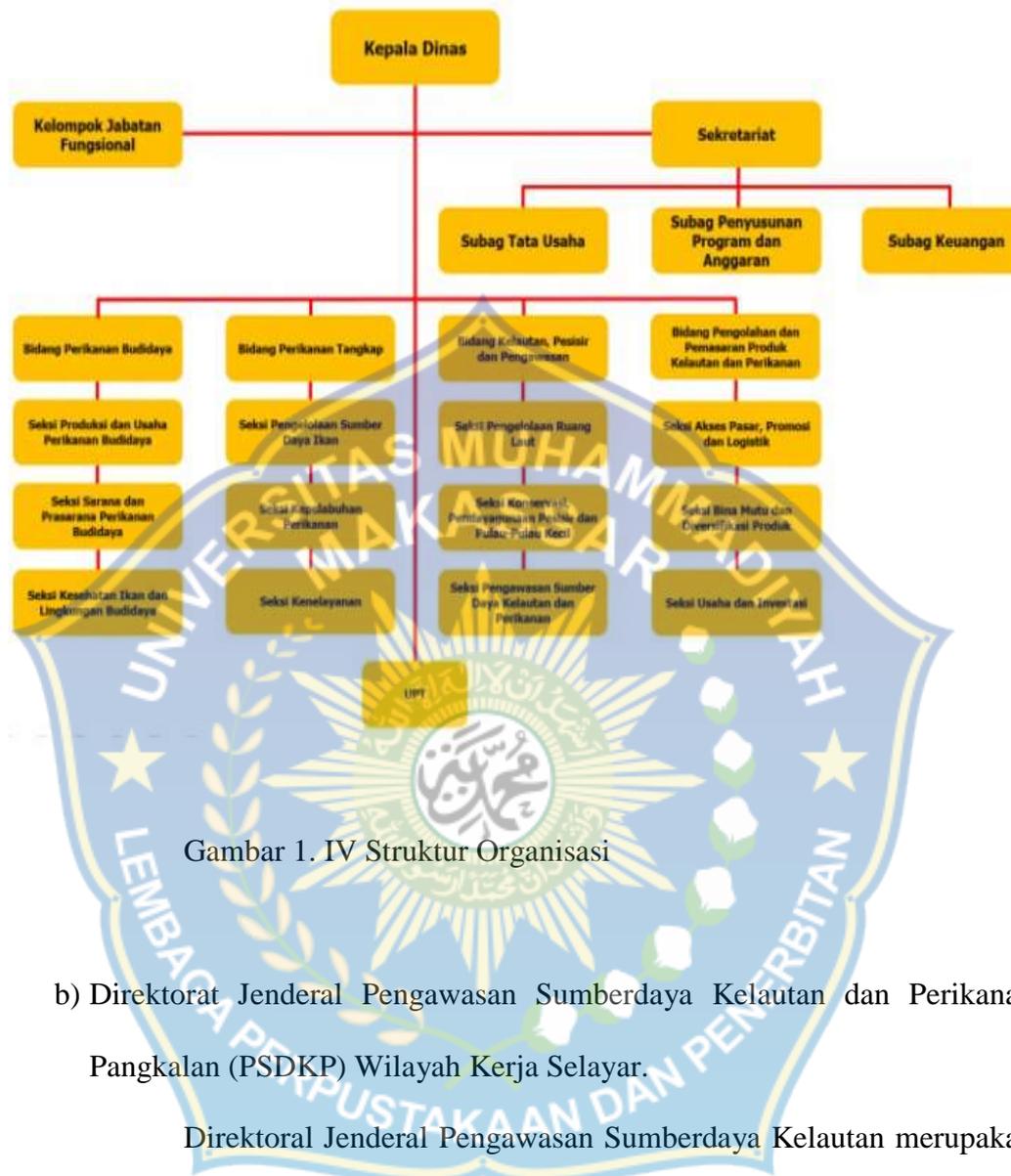
A. Gambaran Umum

1. Profil Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Satwas Takalar Wilker PSDKP Selayar.

a) Dinas Kelautan dan Perikanan

Pengertian Dinas Kelautan dan Perikanan adalah kementerian dalam Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang perikanan sendiri. Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan. Adapun fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan adalah perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dapat menjangkau setiap daerah kerja yang berada di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. Olehnya itu Menteri membuat peraturan yang membuat pembagian kerja. Terletak di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kompleks TPI/PPI Bonehalang, Kode Pos 92812 Benteng.



Gambar 1. IV Struktur Organisasi

b) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pangkalan (PSDKP) Wilayah Kerja Selayar.

Direktoral Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan kementerian kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Direktorat Jenderal PSDKP adalah Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam melakukan pengawasan Ditjen PSDKP berkoordinasi dengan TNI

Angkatan Laut, Bakamla, dan Polair. Terletak di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kompleks TPI/PPI Bonehalang, Kode Pos 92812 Benteng.

2. Deskripsi Informan Penelitian

Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya, adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Ir. Makkawaru (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan)

Selama peneliti menjalani proses penelitian dan wawancara Bapak Ir. Makkawaru merupakan informan yang peneliti pertama kali wawancara dan berdiskusi ketika dilapangan. Beliau sangat antusias untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan kapan saja asalkan tidak mengganggu kesibukan beliau dalam bekerja. Dengan penampilan yang ramah, tegas, berwibawa, lugas dalam berbicara beliau bersedia menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti. Beliau pun tidak segan-segan untuk membantu peneliti mencari informan lainnya agar bersedia menjadi informan dalam penelitian serta mencari data-data yang berguna bagi kesempurnaan penelitian ini. Tidak ada perasaan canggung dalam diri peneliti karena peneliti dan beliau telah saling mengenal sejak peneliti melakukan kegiatan Penelitian di lapangan.

b) Syaiful Asri K, S.Pi (Kepala Pengawasan Perikanan Satwas Takalar Wilker Pos PSDKP Selayar)

Informan kedua yang peneliti wawancarai adalah Bapak Syaiful Asri K, S.Pi. Peneliti memiliki kesan bahwa beliau adalah sosok sangat ramah dan murah senyum. Beliau juga sangat antusias membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Peneliti merasa sudah sangat dekat dengan beliau karena peneliti sudah mengenal beliau ketika peneliti melakukan Observasi.. Beliau adalah orang yang dengan senang hati membantu.

c) Ardiyansah (Nelayan/Masyarakat)

Informan yang satu ini pun tidak kalah ramahnya dari informan yang lainnya. Selain itu beliau juga orang yang humoris dan tipikal orang yang cepat akrab dengan orang. Beliau juga membuka ruang bagi penulis untuk melakukan diskusi tentang kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan. Terumata untuk peneliti beliau bersedia memberikan semua diketahui mengenai pengwasan terpadu dan mutu hasil perikanan.

d) Rizal (Nelayan/Masyarakat)

Beliau juga membuka ruang bagi penulis untuk melakukan diskusi tentang kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan. Terumata untuk peneliti beliau bersedia memberikan semua diketahui mengenai pengwasan terpadu dan mutu hasil perikanan.

3. Deskripsi Hasil Penelitian

Data dari hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh Peneliti pada kurun waktu bulan Mei 2019. Dimana seluruh informan yang melakukan wawancara mendalam adalah informan yang mengerti tentang peraturan perikanan.

B. Bentuk-bentuk Pengawasan Terpadu

1. Wilayah

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai bagaimana Bentuk-Bentuk Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh hasil yang hampir serupa antar jawaban yang satu dengan jawaban lainnya dari masing-masing informan. Seperti hasil wawancara mendalam tentang siapa komunikator yang menyampaikan bentuk-bentuk inovasi pengawasan terpadu dan mutu hasil perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dilakukan dengan Bapak MK, yang dilakukan dimeja kerjanya sebagai berikut:

“Bahwa kewenangan pengawasan itu sudah tidak ada di Pemerintah Kabupaten, itu sudah di ambil alih oleh Provinsi. Namun untuk, efektifnya karena yang di awasi ini nelayan juga, nelayan yang ada di kabupaten sehingga memang harus ada kerja-kerja terpadu ke depan dalam rangka efektifnya pelaksanaan pengawasan ini. Tujuannya dalam pengawasan ini bagaimana supaya ada kepastian tentang perikanan berkelanjutan. Kita akan hindari supaya *illegal fishing*, bom, bius itu bias dikendalikan, dan pengawasan terpadu ini. Jadi disamping cabang Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di Selayar seperti, PSDKP, Perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, aparat pengawasan lainnya memang harus terpadu”(MK, Tanggal 7 Mei 2019).

Sebetulnya komodi perikanan ini, apakah dia hasil budiaya atau hasil tangkap memang termasuk komodi yang daya tahannya itu tidak lama sehingga dibutuhkan sarana prosesi untuk bisa bertahan lama di butuhkan. Di selayar ini sudah ada beberapa, sudah ada pabrik es, konsorit. Ranahnya bukan ke nelayan tapi ranahnya ke pengumpul. Berusaha agar berkonsentrasi untuk membeli ikan di Selayar, dan pabrik es sudah ada yang beroperasi di beberapa tempat di Selayar. Karena es itulah yang bisa mempertahankan kualitas dan menjaga kesegaran ikan, karena kapan tanpa es kesegaran ikan itu akan membusuk. Kemudian pengolahan ikan di selayar sudah berjalan. Yang menjadi konsentrasi sekarang bagaimana caranya agar tetap menjaga kesegaran ikan sampai ke tangan pembeli, pengolahan pasca panen itu ada kelompok-kelompok pengolah ikan menjadi binaan Dinas Kelautan dan Perikanan”

Ketika Peneliti menanyakan kepada Bapak MK. Apa korelasi atau hubungan antara pengawasan dan mutu hasil perikanan?, Pak MK kembali menjawab sebagai berikut:

“Pasti ada, tetapi kaitannya dengan undang-undang itu pengawasan berkelanjutan tetapi kalau misalkan hubungannya pengawasan dengan keamanan pangan dan mutu hasil itu ada karena itu sudah menjadi kebijakan pemerintah untuk memastikan kewananan pangan ke konsumen memang harus ada proteksi dari pemerintah untuk mengawasi bahan-bahan pangan ini termasuk hasil laut harus di awasi untuk di perjualbelikan dan itu bagian dari pengawasan terpadu. Misalnya komoditi ikan hidup, ada kebijakan bahwa harus SKA (surat keterangan asal ikan) baru bisa diperjualbelikan ke luar daerah. Wajib di awasi bahwa komoditi perikanan yang nantinya akan sampai ke konsumen itu layak di konsumsi dan itu butuh pengawasan. Itulah korelasinya.”(tergantung bagaimana pengimplementasiannya, MK, Tanggal 7 Mei 2019)

Selanjutnya wawancara di lanjutkan dengan Bapak SA yang memberikan informasi tentang Bagaimana cara pemerintah mengatasi *illegal fishing* demi menjaga potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar? Beliau pun menjawab:

“jadi yang pasti pemerintah daerah khususnya bupati kepulauan selayar sudah mengeluarkan kebijakan. Kebijakannya yang pertama, setiap desa yang ada lautnya dia wajib membentuk daerah perlindungan laut (DPL) dan bagaimana untuk penyelenggaraan itu, itu harus di anggarkan melalui dana desa karena tidak lagi kewenangan untuk itu, pendekatan pemerintah yang di dekati nelayan atau masyarakatnya sehingga nelayan atau masyarakat dapat mengawasi sendiri karena laut itu adalah kebunnya supaya produktif untuk keberlanjutan perikanan itu. Intinya kesadaran pada masyarakat itu sendiri.”(Hasil wawancara, SA, Tanggal 22 Mei 2019)

Pertanyaan selanjutnya kepada Bapak SA apakah kementerian kelautan dan perikanan sudah menerapkan larangan, batasan, maupun peraturan untuk mengelola sumber daya alam? Beliau pun menjawab sebagai berikut:

“kebijakan dalam bentuk PERPER, undang-undang atau peraturan pemerintah. Misalkan lobster, itu mempunyai kebijakan bahwa ukuran tertentu yang dapat diperjualbelikan memiliki ketentuan atau aturan. Bahkan bersama PDSKP, ada beberapa keramba di lepasliarkan setelah di berikan penyadaran yang punya keramba bahwa ini menyalahi ketentuan bahwa ini belum layak jual dan itu sudah menyalahi aturan jadi di lepasliarkan. Tinggal bagaimana mengimplementasikan itu semua, dalam hal ini kebijakan pemerintah sudah terlaksana sehingga harapan dari kebijakan itu bisa terlaksana.”(Hasil wawancara SA, Tanggal 22 Mei 2019)

Kemudian informasi lainnya disampaikan oleh SA yang mengutarakan bahwa, Pengawasan ini bagaimana supaya ada kepastian tentang perikanan berkelanjutan. Kita akan hindari supaya *illegal fishing*, bom, bius itu bias dikendalikan, dan pengawasan terpadu ini. Yang

berperang di laut itu, yang memegang hak pengawasan itu PEMDA itu ada cabang Dinas Kelautan dan Perikanan, ada juga Polair, dengan TNI AL. Kalau undang-undang perikanan sudah ada turunannya, aturan menteri kelautan dan perikanan sudah di atur semua di dalamnya. Salah satunya kepiting dan lobster itu sudah ada aturannya dan jalur-jalur penangkapan sudah di tentukan dan alat tangkap yang di pakai. Masalah pelanggaran masih ada dan tidak bisa di pandang sebelah mata. Karena inilah yang nanti akan menjadi masalah kita bersama apabila tidak di awasi mulai dari sekarang. Baik itu pelanggaran, muatan kapal dan besar kapal.

Selain itu, perikanan budidaya dianggap sebagai mata pencaharian alternatif, guna mengubah perilaku masyarakat, dimana harus diakui bahwa selama ini, masyarakat Selayar khususnya di wilayah kepulauan, hanya mengenal penangkapan ikan dengan bom dan bius, ataupun dengan cara tangkap lain yang tidak ramah lingkungan. Dengan kehadiran perikanan budidaya, mereka akan terdorong untuk menjaga dan melestarikan kondisi laut yang ada. Ini adalah program penyelamatan yang sangat cocok, karena menyelamatkan perairan Selayar butuh program yang cepat dan tepat. Dari hasil peninjauan pihaknya belum lama ini, menyimpulkan bahwa Kepulauan Selayar sangat cocok dikembangkan perikanan budidaya. Perikanan budidaya memiliki keunggulan dan dapat memilih sendiri jenis ikan yang akan dibudidayakan.

Pengembangan perikanan budidaya, searah dengan visi DKP yaitu Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia tahun

2015. Yang berbasis pada Pengembangan Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan dukungan Infrastruktur dari Lingkup Pekerjaan Umum. Diharapkan, perencanaan dan konsep tersebut, disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dan kelengkapannya dan pencapaiannya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dijelaskan, memang tidak mudah untuk beralih dari nelayan tangkap menjadi nelayan budidaya.

Namun cepat atau lambat, nelayan harus mulai dibiasakan melakukan perubahan-perubahan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kepulauan Selayar harus mensosialisasikan keunggulan-keunggulan perikanan budidaya. Antisipasi yang dilakukan bila nelayan berpindah menjadi nelayan budidaya, adalah menyediakan bibit-bibit ikan yang memiliki nilai ekonomis, seperti kerapu dan lain-lainnya serta memberikan bimbingan dan pendampingan dengan ketersediaan tenaga penyuluh dalam pengelolaan budidaya perikanan.”

Lalu Peneliti menanyakan apakah masih menangkap ikan secara atau sudah memakai alat teknologi? Ketika ditanya ke Bapak Ardiyansah dan kemudian menjawab demikian:

“Terdapat berbagai jenis alat tangkap ikan yang dioperasikan di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, namun pengetahuan mengenai jenis alat tangkap yang dioperasikan di masing-masing kecamatan belum diketahui secara pasti karena minimnya informasi yang ada. Spesifikasi data alat tangkap yang di analisis adalah ukuran utama alat tangkap seperti panjang, lebar, mesh size, jarak antar pelampung, jarak antar pemberat, bahan yang digunakan, serta ukuran dari bagian-bagian alat tangkap (untuk yang menggunakan jaring), sedangkan pada alat tangkap lain (tanpa jaring) adalah

ukuran panjang, diameter, bahan yang digunakan dan ukuran bagian-bagian dari alat tangkap”(Hasil wawancara,A, Tanggal 23 Mei 2019)

Pelatihan dan sosialisasi yang pertama kali dilaksanakan ini sangat dibutuhkan dan perlu keberlanjutan pelatihan yang lebih detil lagi karena di era digital ini nelayan tidak boleh tertinggal dengan teknologi informasi. Sasaran dari program Nelayan Go Online ini adalah untuk memberikan fasilitas edukasi dan pembelajaran kepada para nelayan dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital sehingga nelayan dapat memasarkan dan menjual produknya pada *marketplace* yang sudah ada. Selain itu, juga dapat mencari informasi serta penyuluhan secara *online* sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Selain jeni alat tangkap jarring lingkaran, juga memakai alat tangkap yaitu pukak. Yang di pakai di empang. Mempunyai empang ikan bandeng yang setiap 1 kali dalam satu musim panen.

Sebagai Negara maritim yang dikenal memiliki garis pantai terpanjang di dunia, pemerintah terus berupaya memaksimalkan segala potensi yang ada di wilayah airnya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Upaya yang dilakukan adalah fokus mengembangkan potensi perikanan dan rumput laut. Pengembangan yang dilakukan itu adalah untuk akuakultur. Pengembangan tersebut dilakukan untuk memberi kemudahan pelaku sektor budidaya perikanan.

Dengan akuakultur, kita bisa mengembangkan budidaya perikanan dengan lebih baik, efisien dan berbiaya rendah serta sangat membantu para pelaku usaha. Yang dimaksud akuakultur adalah kegiatan pemberdayaan ikan dari mulai pengadaan atau perekayasaan strim unggul sampai benihnya. Kemudian juga ke tahap teknologi pembudidayaannya, yang didalamnya mencakup teknologi pakan, teknologi mengatasi penyakit juga.

Pertanyaan terakhir peneliti kepada Pak A, bagaimana selama ini,ada pengawasan dari pemerintah atas penangkapan ikan yang dilakukan? Beliau pun menjawab sebagai berikut:

“Pengawasan dari pemerintah daerah pasti ada, namun semuanya di serahkan kepada masing-masing nelayan untuk mengawasi sendiri hasil tangkapan mereka. Karena ada peraturan yang mengandung dalam hal menangkap ikan dan wilayah laut tertentu. Adapun kapal untuk menangkap ikan juga di tentukan agar kapal yang di pakai tidak melanggar aturan yang berlaku”. Pengawasan dilakukan terhadap berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan”(Hasil wawancara,A, Tanggal 23 Mei 2019)

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal ini menjadi salah satu keunggulan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, disadari bahwa masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak taat aturan dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Untuk itu, pengawasan hadir dalam rangka menjamin tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam hal mengawal kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sudah barang tentu bahwa melalui pengawasan yang optimal maka penegakan hukum di laut, terutama dari kapal-kapal asing pelaku *illegal fishing* akan semakin baik, maka bangsa Indonesia akan berdaulat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Obyek yang diawasi antara lain : *illegal unreported and uregulated (IUU) fishing*, *destructive fishing*, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, ekosistem pesisir, pemanfaatan pasir laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMK), dan bangunan laut.

2. Batasan

Sumber daya laut milik bersama, kebanyakan masyarakat. Salah satu yang masih jalan itu kelompok pembinaan masyarakat, yaitu kelompok pengawas. Pembinaannya itu ada di provinsi bukan lagi di daerah. Jadi masyarakat di ajak untuk membantu pengawasan karena mereka lebih dekat di lokasi dan paham situasi lapangan apa yang terjadi. Jadi sebagian di serahkan kepada masyarakat itu sendiri, tergantung bagaimana mereka mengelola dan menjalankan implementasi yang di berikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sambil menangkap ikan, masyarakat juga membantu pengawasan dengan menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Peneliti lebih lanjut bertanya kepada Bapak MK bagaimana batasan wilayah perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar?

Beliau pun menjawab sebagai berikut:

“Kabupaten kepulauan Selayar memiliki kesatuan ekosistem pesisir yang lengkap dengan potensi ekologi, ekonomi, dan pertahanan keamanan yang besar. Namun, pemanfaatannya dinilai masih belum optimal. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang izin Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya”(MK, Tanggal 7 Mei 2019)

Dalam menangani kasus selalu ada hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses upaya pengawasan terpadu dan mutu hasil perikanan. Begitu pula dengan *illegal fishing* yang harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar juga telah berusaha menangani dan mencegah bertambahnya kasus-kasus *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun dalam upaya pengawasan di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

a.) Faktor Pendukung.

Adapun yang dimaksud dengan faktor pendukung dalam hal ini adalah segala sesuatu yang menunjang dan mendukung kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mencegah kasus *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni adanya peranan para tokoh masyarakat yang membantu para petugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberikan informasi jika ada kegiatan yang menyangkut *illegal fishing* yang terjadi di wilayah sekitar desanya. Serta adanya

kerjasama tim yang baik yang terjalin didalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

b.) Faktor penghambat

Dalam rangka menekan angka kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, sudah menjadi hal pasti bahwa ada saja kendala yang dialami dalam rangka menuntaskan persoalan *illegal fishing* yakni:

- 1.) Alat dan bahan yang digunakan masih terjual bebas di pasaran.
- 2.) Kurangnya kesadaran pada masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari praktek *illegal fishing* tersebut.
- 3.) Kurangnya personil pengawas
- 4.) Kurangnya fasilitas patrol.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Mei sampai tanggal 4 Juli 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer 3 orang informan dan menggunakan teknik penentuan informan yaitu *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah menunjukkan hasil yang baik dan telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kinerja dengan kategori yang sangat memuaskan.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dari pencegahan kasus *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu faktor internal diantaranya kemampuan dari pihak-pihak Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengeksekusi oknum yang terindikasi melakukan praktek illegal fishing, adanya motivasi kerja yang kuat dan kerjasama tim yang baik dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kurang lebih 130 pulau-pulau kecil. Dari jumlah tersebut 127 pulau merupakan pulau sangat kecil yang ukurannya di bawah 100 km, hanya 33 di antaranya yang berpenghuni.

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Adapun tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan secara umum yaitu sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan serta pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan

usaha kelautan dan perikanan serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

- c) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- d) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang kelautan dan perikanan.
- e) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat dibidang kelautan dan perikanan.
- f) Pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
- g) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- h) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- i) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Aturan

Dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dijelaskan bahwa alat penangkapan ikan adalah salah satu sarana dan perlengkapan benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Metode Penangkapan ikan telah berkembang di berbagai Negara di dunia selama jangka waktu yang sudah lama. Sampai sekarang mulai dari alat tangkap yang primitif atau tradisional sampai penggunaan alat tangkap yang paling modern masih tetap digunakan oleh nelayan. Dalam CCRF (*code of conduct for responsible fishers*) ada 9 kriteria bagi teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan yaitu:

- 1.) Memiliki selektivitas tinggi artinya, alat tangkap tersebut diupayakan hanya dapat menangkap ikan/organisme lain yang menjadi sasaran penangkapan saja. Ada 2 macam selektivitas yakni, selektivitas ukuran dan selektivitas jenis.
- 2.) Hasil penangkapan Sampingan (*bycatch*) Rendah Bycatch merupakan tangkapan ikan on target yang tertangkap dalam proses penangkapan, karena tangkapan sampingan ini tertangkap bersamaan dengan target penangkapan.
- 3.) Hasil tangkapan berkualitas tinggi.
- 4.) Tidak merusak habitat/lingkungan (*destruktif*).
- 5.) Mempertahankan keanekaragaman hayati.
- 6.) Tidak menangkap spesies yang dilindungi.
- 7.) Pengelolaan API yang tidak membahayakan keselamatan.
- 8.) Tidak melakukan penangkapan ikan di daerah terlarang.
- 9.) Dapat diterima secara sosial.

Berdasarkan Kepmen KP No.KEP.06/MEN/2010 dan Permen KP No.2/2015 ada 8 jenis alat tangkap ikan yang diperbolehkan di Indonesia yakni:

- 1.) Kelompok jarring lingkaran (*surrounding Nets*).
- 2.) Kelompok penggaruk (*Dredges*).
- 3.) Kelompok jaring angkat (*Lift Nets*).
- 4.) Kelompok alat yang di jatuhkan (*Falling Grears*).
- 5.) Kelompok jarring Insan (*Gillnets and Entangling Nets*)
- 6.) Kelompok perangkap (*Traps*).
- 7.) Kelompok pancing (*Hooks and Lines*).
- 8.) Kelompok alat penjepit dan melukai (*Grapping and Wounding*).

Alat Tangkap yang dilarang

- 1.) Larangan terhadap penggunaan bahan peledak; penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan disekitar terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada disekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan.
- 2.) Bahan beracun; Bahan kimia mudah meledak bila reaksi kimia bahan tersebut menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi, sehingga menimbulkan kerusakan disekelilingnya.

c. Aturan

Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Unreported Fishing* adalah kegiatan perikanan tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar.

Unregulated Fishing yaitu kegiatan perikanan tidak diatur, seperti kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah.

Hal ini menjadi salah satu keunggulan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, disadari bahwa masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak taat aturan dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Untuk itu, pengawasan hadir dalam rangka menjamin tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal mengawal kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sudah barang tentu bahwa melalui pengawasan yang optimal maka penegakan hukum di laut, terutama dari kapal-kapal asing pelaku *illegal fishing* akan semakin baik, maka bangsa Indonesia akan berdaulat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengawasan dilakukan terhadap berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Obyek yang diawasi antara lain : *illegal unreported and uregulated (IUU) fishing, destructive fishing*, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, ekosistem pesisir, pemanfaatan pasir laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMK), dan bangunan laut. Pengawasan dilakukan melalui pendekatan *hard structure* dan *soft structure*, mulai dari hulu hingga hilir. Pendekatan *hard structure* dilakukan dengan memeriksa dokumen

perizinan, melakukan pemantauan posisi dan pergerakan kapal perikanan menggunakan sarana *vessel monitoring system (VMS)*, melakukan operasi pengawasan di laut baik secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan institusi penegak hukum lainnya (TNI-AL, POLAIR, TNI-AU, dll.).

Pengawasan juga didukung oleh perangkat teknologi canggih yang dikenal dengan *Vessel Monitoring System (VMS)*/Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang merupakan salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan berbasis satelit. Implementasi VMS merupakan bentuk komitmen Indonesia memenuhi ketentuan internasional, regional, maupun nasional untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan. Sejak tahun 2003, Direktorat Jenderal PSDKP telah mengimplementasikan VMS bagi kapal-kapal perikanan dengan membangun sistem pemantauan dan operasional VMS, serta memasang *transmitter* pada kapal-kapal perikanan dengan ukuran tertentu (> 30 GT).

Penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* dilakukan berdasarkan Pasal 76A UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pasal 83A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan, yang menyebutkan selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing. Pemulangan/deportasi ABK non justisia juga meringankan tugas para PPNS di lapangan. Dengan dipulangkannya ABK non justisia, maka tugas dan tanggung jawab petugas dilapangan akan semakin ringan dan lebih terkonsentrasi pada proses hukum terhadap tersangka.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pelatihan Sosialisasi Implementasi Program Nelayan Go Online. Kepulauan Selayar terdiri dari 132 pulau dan 32 pulau yang merupakan pulau berpenghuni. Potensi perikanan dan pariwisata maritim di Kepulauan Selayar sangat besar, ditandai dengan adanya gugusan karang terbesar ketiga di dunia yang terletak di Takabonerate. Adapun jenis ikan yang ada di Kepulauan Selayar diantaranya ikan pelagis, ikan laut dalam, lobster, dan rajungan.

Informan lainnya yaitu Bapak A selaku nelayan/masyarakat? Beliau pun menjawab:

“Respon positif tersebut, tidak terlepas dengan keuntungan yang dirasakan langsung masyarakat, ternyata sangat mendapat respon luar biasa. ada beberapa keunggulan perikanan budidaya dibanding perikanan tangkap. Antara lain, perikanan budidaya tidak mengenal musim, selain itu masa panen bisa diatur sendiri nelayan. Sedangkan nelayan tangkap, sangat tergantung pada musim dan ketergantungan pada jauhnya melaut. Perikanan budidaya akan mendorong etos kerja masyarakat, karena semakin banyak bekerja dan membudidayakan usahanya, maka akan semakin banyak pula

mereka mendapatkan pendapatan”(Hasil wawancara,A, Tanggal 23 Mei 2019)

Permasalahan yang saat ini dihadapi selain pada akses pasar juga pembinaan dalam proses pengolahan hasil tangkapan. Dengan adanya pelatihan ini yang memberikan pelatihan terkait aplikasi khusus untuk nelayan yang bisa memberikan kemudahan bagi nelayan menangkap ikan dan update informasi harga pasar setiap hari. Pelatihan dan sosialisasi yang pertama kali dilaksanakan ini sangat dibutuhkan dan perlu keberlanjutan pelatihan yang lebih detil lagi karena di era digital ini nelayan tidak boleh tertinggal dengan teknologi informasi. Sasaran dari program Nelayan Go Online ini adalah untuk memberikan fasilitas edukasi dan pembelajaran kepada para nelayan dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital sehingga nelayan dapat memasarkan dan menjual produknya pada *marketplace* yang sudah ada.

Selain itu, juga dapat mencari informasi serta penyuluhan secara *online* sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Implementasi Nelayan Go Online di Kabupaten Kepulauan Selayar terlaksana atas kerjasama Kementerian Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Camat Bontoharu, dan dihadiri oleh 150 nelayan yang berasal dari enam kecamatan.

C. Mutu

Kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melakukan pengenalan pemeriksaan klinis dan deteksi hasil tangkapan *destructive*

fishing, kegiatan dilakukan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas penyuluh perikanan, mengenai penangkapan ikan yang merusak dan sistem deteksi cepat identifikasi ikan hasil tangkapan yang tidak ramah lingkungan. Penyuluh dipilih sebagai agen penyadartahuan yang nantinya dapat memberikan penyuluhan kepada nelayan sesuai tugasnya. Dalam kegiatan ini, diberikan pembekalan tahapan pemeriksaan klinis ikan yang ditangkap dengan cara di bom. Melalui metode visual dan pembedahan untuk mengetahui kerusakan organ tubuh pada ikan.

Peneliti selanjutnya bertanya kepada bapak Ardiyansah yang sekarang di gunakan nelayan terutama bapak sendiri? Beliau pun menjawab:

“adapun jenis tangkapan yang dipakai yaitu jarring lingkar (*Surrounding Nets*). Bukan saya, nelayan lainpun memakai jenis alat tangkap ikan yang sama. Adapun cara pemakaiannya mungkin berbeda tetapi yang jelas masih menggunakan alat tradisional. Tetapi baru-baru ini telah di sosialisasikan pelatihan Sosialisasi Implementasi Program Nelayan Go Online di Kabupaten Kepulauan Selayar”(Hasil wawancara,A, Tanggal 23 Mei 2019)

Organ dalam tubuh pada ikan yang di periksa antara lain gelembung renang maupun tulang. Jika gelembung renangnya pecah dan keluar darah dari ruas tulangnya, ini merupakan indikasi awal bom yang dipakai untuk menangkap sangat eksplosif. Selain pemeriksaan klinis, juga diperkenalkan metode deteksi cepat ikan yang ditangkap melalui *destructive fishing*, secara laboratoris. Dengan metode ini hasilnya bisa diperoleh dalam waktu kurang dari 2 jam.

1). Kualitas

Mutu ikan segar dan penanganan ikan setelah penangkapan atau pemanenan memegang peranan penting untuk memperoleh nilai jual ikan yang maksimal. Salah satu faktor yang menentukan nilai jual ikan dan hasil perikanan yang lain adalah tingkat kesegarannya. Semakin segar ikan sampai ke tangan pembeli maka harga jual ikan tersebut akan semakin mahal.

Untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang mempunyai kesegaran dan kondisi ikan yang baik perlu diperhatikan beberapa hal pada pekerjaan pemberian es yaitu, jumlah es sangat berpengaruh pada faktor keuntungan operasi penangkapan ikan. Karena penentuan jumlah kebutuhan es termasuk dalam modal awal penangkapan ikan. Semakin banyak es maka modal pun akan semakin banyak. Jadi kebutuhan akan es benar-benar di perhitungkan. Dalam hal penentuan kebutuhan akan jumlah es ada perhitungannya. Jumlah es yang diberikan akan berbeda sesuai dengan suhu awal ikan tersebut.

Kemudian bagaimana hasil perikanan di kabupaten kepulauan selayar? Pak SA mengungkapkan jawaban sebagai berikut:

“paling yang di kaitkan dengan mutu hasil misalkan ujia formalin, tapi itu ikan teri dan ikan kering yang ada di kepulauan selayar dan juga karantina ikan seperti ikan bandeng, udang dll.”(Hasil wawancara, AS, Tanggal 22 Mei 2019)

Dalam menjaga mutu hasil perikanan maka mutu bahan baku adalah bahan baku harus bersih, bebas dari setiap bau yang menandakan pembusukan, bebas dari tanda dekomposisi dan pemalsuan, bebas dari sifat-sifat alamiah lain yang dapat menurunkan mutu serta tidak

membahayakan kesehatan. Secara organoleptik atau pengaruh bahan baku terhadap ikan harus mempunyai karakteristik kesegaran sekurang-kurangnya, rupa dan warna bersih, warna daging spesifik jenis ikan segar, bau, segar spesifik jenis, bau rumput laut segar, daging elastis, padat, dan kompak, rasa netral, agak manis. Demikian kesegaran ikan tidak dapat ditingkatkan tetapi hanya dapat dipertahankan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi setelah ikan mati.

Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar bidang Perikanan seksi pengujian dan pengawasan mutu mempunyai tugas menguji dan mengawasi mutu hasil perikanan yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan program seksi pengujian dan pengawasan mutu
- b) Pengelolaan data mutu
- c) Pelaksanaan pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan
- d) Penyiapan bahan kebijakan penerbitan sertifikasi mutu hasil perikanan
- e) Penyiapan bahan kebijakan pembangunan dan pengolahan laboratorium pengujian mutu hasil perikanan
- f) Penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi pengujian dan pengawasan mutu.

Adapun uraian kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana program/kegiatan seksi pengujian dan pengawasan mutu.
- b) Inventarisasi dan pengolahan data mutu hasil perikanan
- c) Pelayanan pengujian mutu hasil perikanan (pengambilan sampel, penerimaan sampel, arsip contoh).
- d) Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan (Organoleptik, Mikrobiologi dan Formalin)
- e) Pembinaan dan pemberian rekomendasi penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- f) Pembinaan penerapan GMP, SSOP dan HACCP Unit Pengolahan Hasil Perikanan
- g) Pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia produk perikanan
- h) Pembinaan mutu hasil perikanan di Kabupaten/Kota.
- i) Monitoring mutu hasil perikanan yang didistribusikan/dipasarkan.
- j) Monitoring hasil perikanan di Tambak/Kolam, tempat Pendaratan ikan/TPI.

Tingkat kesegaran adalah tolak ukur untuk membedakan ikan yang bermutu baik dan buruk. Ikan dikatakan masih segar jika perubahan-perubahan biokimia, mikrobiologi, fisika yang terjadi belum menyebabkan perubahan-perubahan sifat ikan pada waktu masih hidup. Semua organ tubuhnya baik daging, mata maupun insannya masih benar-benar dalam keadaan segar. Kesegaran ikan biasanya di dapatkan pada pola operasi

penangkapan ikan yang menggunakan sistem penangkapan ikan yang menggunakan sistem *one day fishing* (satu hari penangkapan) selain itu faktor penanganan pasca penangkapan juga hal yang sangat penting.

Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas mutu ikan dikaitkan dengan kesegaran dan kerusakan ikan:

- 1) Jumlah dan jenis mikrofloranya (lingkungan)
- 2) Adanya cemaran pada daerah-daerah tertentu, memungkinkan mempengaruhi cita rasa daging ikan.

2) . Kuantitas

Tingginya kebutuhan ini mendorong masyarakat nelayan di Selayar dan sekitarnya untuk mencoba cara cepat mendapatkan ikan yang banyak namun tidak ramah lingkungan. Sumber daya laut di Selayar pernah mengalami masa eksploitasi yang berlebihan. Hal ini terutama didorong dari minimnya pengetahuan nelayan di sana akan dampak dari aktivitas destruktif mereka.

“Memang, mayoritas nelayan tradisional, dulu kami sering mengambil karang di laut untuk di jadikan bahan bangunan rumah. Kami tidak menyangka itu bisa mempengaruhi jumlah ikan di perairan kami”.(Hasil wawancara,R,tanggal 23 Mei 2019)

Penangkapan ikan yang merusak dan aktivitas pengambilan karang memang sempat meningkatkan pendapatan nelayan di Selayar. Namun berbagai persoalan mulai muncul belakangan. Setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir, masyarakat Selayar mulai menghadapi penurunan

ketersediaan stok ikan dan rusaknya terumbu karang yang nota bene menjadi rumah bagi banyak jenis ikan.

Menyadari bahwa tugas menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu tujuan akhir dari setiap program pelestarian adalah menjaga ketersediaan stok ikan agar mata pencaharian nelayan tetap terjamin. Memberi perhatian besar pada upaya-upaya memperkenalkan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir yang selama ini hanya mnggantungkan hidup dari menangkap ikan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Perikanan berkelanjutan 2019 dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

- 1.) Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, Pelaksanaan Inovasi Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, kesimpulannya adalah bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terpadu dan mutu hasil perikanan, dapat di ambil kesimpulan bahwasanya telah terlaksananya kegiatan tersebut demi mencegah terjadinya *illegal fishing*, bius, bom dan lain sebagainya. Pelaksanaan kegiatan inovasi pengawasan masih dalam tahap pelatihan bagi nelayan setelah itu menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- 2.) Beberapa faktor penghambat pelaksanaan inovasi pengawasan dan mutu hasil perikanan adalah faktor yang berasal dari minimnya aparat fungsional dalam menjalankan pengawasan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Faktor yang menjadi penghambat, berasal dari sekolah antara lain; Alat dan bahan yang dipergunakan untuk melakukan pegeboman dan pembiusan yang masih terjual bebas di pasaran terutama sejenis bahan impor pupuk yang dijadikan

sebagai bahan dasar peledak bom ikan. Kurangnya kesadaran beberapa masyarakat.

3). Didorong oleh faktor ekonomi nelayan yang rendah menjadi penyebab maraknya kejahatan illegal fishing karena keuntungan dari pengeboman maupun pembiusan sangatlah berlipat ganda jika dibandingkan hanya menggunakan alat tangkap yang biasa. Inilah alasan yang paling sering diungkapkan para nelayan jika ditangkap oleh pihak yang berwajib. Ketidapahaman akan akibat yang ditimbulkan dari apa yang dilakukan adalah salah satunya para nelayan tidak mengerti jika mereka terus melakukan illegal fishing maka biota laut pasti akan mulai punah terlebih lagi tempat mereka tinggal yakni terumbu karang akan ikut rusak. Masih dibutuhkannya tambahan personil pengawas untuk efektifitas pengawasan laut 24 jam. Kurangnya fasilitas patroli dan banyaknya kerusakan alat pengawas seperti speedboat. Selain belum tersedianya secara khusus kapal pengawas untuk Dinas Kelautan dan Perikanan yang dapat dioperasikan secara resmi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Sehingga dalam hal sangat dibutuhkan kapal pengawas yang cukup untuk Dinas Kelautan dan Perikanan. Mengeksekusi oknum yang terindikasi melakukan praktek illegal fishing, adanya motivasi kerja yang kuat dan kerjasama tim yang baik dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, (b) faktor eksternal, diantaranya adanya partisipasi masyarakat yang ikut mengawasi dan mencegah adanya praktek illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan faktor penghambat dari pencegahan kasus illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu, kurangnya fasilitas patroli dan banyaknya kerusakan alat pengawas, kurangnya kesadaran beberapa

masyarakat terutama masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan illegal fishing, alat dan bahan yang dipergunakan untuk melakukan pengeboman dan pembiusan ikan masih terjual bebas di pasaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar berdasarkan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah menunjukkan hasil yang baik. Dari ke empat indikator penilaian kinerja tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kinerja dengan kategori sangat memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1.) Peranan Pemerintah daerah sangat dominan dalam membentuk karakter nelayan/masyarakat melalui proses sosialisasi pelatihan yang pertama kali dilaksanakan ini sangat dibutuhkan dan perlu keberlanjutan pelatihan yang lebih detil lagi karena di era digital ini nelayan tidak boleh tertinggal dengan teknologi informasi.
- 2.) Pemerintah daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan lebih mengembangkan strategi pencegahan dengan melakukan inovasi pengawasan terpadu dan mutu hasil perikanan untuk membuat nelayan/masyarakat memahami aturan-aturan yang berlaku dalam perikanan dan dapat

memanfaatkan dengan baik hasil tangkapan mereka sehingga dapat diperjualbelikan ke pasar ataupun keluar daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Budi Wiryawan & Akhmad Solihin. 2015. *Daerah Penangkapan Ikan Dalam Prespektif Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Bandung: Nuansa Auli
- Dian Saptiriani. Dkk. 2013. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Wilayah Pesisir, Kerjasama Antara Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dengan Kementerian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Gatot Supramono. 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Dibidang Kelautan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hasyim Djalal. 2012. *Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut*, Bandung: Bina Cipta
- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksar
- Joko Subagyo . 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muri Yusuf .2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Prenamedia Group
- Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Pius A Purtanto & M.Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya.: Arloka
- Sudirman. 2013. *Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan*, Jakarta.: Rineka Cipta

Sumadi Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan

No.26/Permen-KP/2016

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
No.23/PermenKP/2015

Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No
31 Tahun 2004

Perda Kab.Kep.Selayar No.12 Tahun 2016

Perda Kab.Kep.Selayar No.5 Tahun 2009

Artikel:

Setiyowati, Dkk. 2016. Katalog Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir. Badan
Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.

Artikel Tentang Terumbu Karang Kab.Kep.Selayar, Diterbitkan Pada Tanggal 23
Januari 2005.

Skripsi:

Skripsi Mantansia, *Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
No.02 Tahun 2015 Tentang Larangan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela
(Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Kec.Galesong Utara
Kab.Takalar.* jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, FIS.
UNM

Skripsi Wilater Pramono,R.S *Tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap*

Illegal Fishing Yang Terjadi Di Kota Makassar (Study Kasus 2010-2013)

Internet:

PacitanWeru.<http://weru-paciran.blogspot.co.id/2010/01/penangkapan-ikan-laut-dan-jenis-alat.html>

<http://lintasterkini.com/29/11/2016/satpol-air-polres-selayar-amankan-5-kapal-illegal-fishing-tangkap-28-pelaku.html>, diakses 29 maret 2019

<http://adaddanuarta.blogspot.co.id/2014/11/kinerja-karyawan-menurut-para-ahli.html>

<https://www.news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>, diakses 30 maret 2019

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran Tabel

Produksi Perikanan Tangkap Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2017-2018

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	
		Tahun 2017	Tahun 2018
		Produksi (Ton)	Produksi (Ton)
1	Cendro	611.7	615.1
2	Ekor Kuning	13.5	19.8
3	Lolosi Biru	15.4	17.1
4	Selar	275.1	257
5	Kuwe	739.7	702.8
6	Layang	408.5	900
7	Sunglir	27.3	22.2
8	Tetengkek	391.8	397.7
9	Bawal Putih	140.6	141.5
10	Talang-Talang	394.2	382.4
11	Bentong	56	41.1
12	Kakap Putih	60.6	56.9
13	Japuh	211	162.3
14	Tembang	365	285.4
15	Siro	199	176.1
16	Lemadang	136.7	119.9
17	Teri	334.9	258.4
18	Ikan Terbang	48	56
19	Julung-Julung	607.3	623
20	Gerot - Gerot	502.2	475
21	Ikan Layaran	0.5	0.3
22	Setuhuk Hitam	38.3	39
23	Setuhuk Biru	0	0
Sub Jumlah I		5,577.3	5,749

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan.

Data Armada Perahu/Kapal Perikanan Tangkap

Armada Perahu/Kapal penangkap ikan di Indonesia dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu perahu tanpa motor, motor tempel, dan kapal motor.

Tabel 2. Data armada perahu/kapal tahun 2017-2018

Uraian	Jumlah (unit)	
	2017	2018
Tanpa perahu	-	-
Perahu Tanpa Motor	1.262	1.262
- Jukung	299	299
- Perahu papan kecil	451	451
- Perahu papan sedang	316	316
- Perahu papan besar	196	196
Motor Tempel	2.388	2.418
- < 5 GT	2.388	2.418
- 5-10 GT	0	0
- 10-20 GT	0	0
- 20-30 GT	0	0
- >30 GT	0	0
Kapal Motor	2.907	2.933
- < 5 GT	2.763	2.789
- 5-10 GT	131	131
- 10-20 GT	6	6
- 20-30 GT	3	3
- 30-50 GT	4	4
- 50-100 GT	0	0
- 100-200 GT	0	0
- 200-300 GT	0	0
- 300-500 GT	0	0
- 500- 1000 GT	0	0
- > 1000 GT	0	0

Sumber: *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) wilayah selayar.*

Alat Penangkap Ikan

Tabel 3. Data alat penangkap ikan tahun 2017-2018

Jenis Alat Penangkapan Ikan		Jumlah (unit)	
		2017	2018
Jaring Lingkar	Jaring lingkar bertali kerut (Pukat cincin)	23	23
	Jaring insang tanpa tali kerut (Lampara)	-	-
Pukat Tarik	Pukat tarik pantai (Pukat Pantai)	-	-
	Dogol	-	-
	Payang	-	-
	Cantrang (termasuk Arad)	-	-
	Lampara dasar	-	-
Pukat Hela	Pukat hela berpaling (Pukat tarik berbingkai)	-	-
	Pukat hela dasar udang (Pukat udang)	-	-
	Pukat hela pertengahan berpapan (Pukat ikan)	-	-
	Pukat dorong (Songko)	-	-
Penggaruk	Alat penggaruk berkapal (Penangkap kerang, teripang/biota menetap lainnya)	-	-
	Alat penggaruk tanpa kapal (Penangkap kerang/teripang/biota menetap lainnya)	-	-
Jaring Angkat	Anco	-	-
	Bagan perahu	119	119
	Bouke ami	-	-
	Bagan tancap	21	21
Alat yang dijatuhkan	Jala jatuh berkapal	-	-
	Jala tebar	-	-
Jaring insang	Jaring insang tetap/Jaring lion bun	734	739
	Jaring insang hanyut/Jaring insang oseanik	1.521	1.543
	Jaring insang lingkar	-	-
	Jaring insang berpancang	-	-
	Jaring insang berlapis/Trammel nets	-	-

Sumber: : Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten kepulauan selayar.

DOKUMENTASI:



Gambar 1: Foto pada saat observasi lapangan



Gambar 2: Foto pada saat wawancara. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan)



Gambar 3,4,5 : Foto pada saat wawancara Informan



Gambar 4: pada wawancara infoman.



Gambar 5: ikan siap di pasarkan.

RIWAYAT HIDUP



ARIE PURNAMA, Lahir di Benteng Kabupaten

Kepulauan Selayar pada Tanggal 31 Oktober 1995. Anak

Pertama dari pasangan Ardiyansah dan Marti. Penulis

menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD INPRES

BENTENG TIMUR pada tahun 2008. Pada tahun itu juga

penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 1

BENTENG dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di

SMA NEGERI 1 BENTENG dan tamat pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun

2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan.

Pada tahun 2019 ini akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana

Strata Satu (S.1) dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Inovasi

Pengawasan Terpadu dan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan

Selayar”.